

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.R/2018/PN.BJB)**

**Oleh :
Ketut Krisna Yudhajaya, NIM 1814101090
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia, serta (2) menganalisa pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana tindak pidana prostitusi dalam Putusan No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat runtun dan logis. Hasil penelitian adalah (1) pengaturan prostitusi online tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun pengaturan tentang pelaku prostitusi tersirat dalam Pasal 296 KUHP yang menentukan pemidanaan hanya dikenakan bagi orang yang menggunakannya sebagai mata pencaharian. Kemudian (2) pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan No. 6/PID.R/2018/PN.BJB adalah keterangan para saksi yang mendukung tindakan terdakwa yang telah melakukan praktek pelacuran dengan imbalan sebesar Rp. 80.000,- sehingga tindakan terdakwa termasuk telah menyakinkan bersalah melakukan tindakan prostitusi sehingga dikenakan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjar Baru No. 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan.

Kata Kunci : Prostitusi, Tindak Pidana, Pemidanaan.

**CRIMINAL PROSECUTION OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS
OF PROSTITUTION THROUGH ONLINE MEDIA
(CASE STUDY OF PUTUSAN NUMBER 6/PID.R/2018/PN.BJB)**

By.
Ketut Krisna Yudhajaya, NIM 1814101090
Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the regulation of online prostitution in Indonesia, and (2) analyze legal considerations for the criminal act of prostitution in Decision No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB. The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the statute approach and the case approach. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data in the form of coherent and logical sentences. The results of the study are (1) the regulation of online prostitution is not clearly regulated in the laws and regulations but the regulation of prostitution is implied in Article 296 of the Criminal Code which determines that punishment is only imposed on people who use it as a livelihood. Then (2) legal considerations in imposing Decision No. 6/PID.R/2018/PN.BJB are statements of witnesses who support the actions of the defendant who has practiced prostitution in exchange for Rp. 80,000, - so that the defendant's actions include being convinced that he is guilty of committing acts of prostitution so that he is subject to Article 3 Paragraph (1) letter b Banjar Baru City Regulation No. 6 of 2002 concerning Eradication.

Keywords: Prostitution, Crime, Criminalization.

